



Pembahasan Hasil Riset:

**Efektivitas Pelaksanaan PP Nomor 39 Tahun 2006
Tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan**

Disampaikan dalam:
Forum Diskusi Biro Hukum - Kementerian PPN/Bappenas

Nugroho Ananto

Jakarta, 19 Nopember 2012



- 1 Pengantar**
- 2 Hasil Pengolahan Data**
- 3 Analisis Sederhana (ilustrasi)**
- 4 Hal yang Memerlukan Perhatian**



1 Pengantar



2

Hasil Pengolahan Data

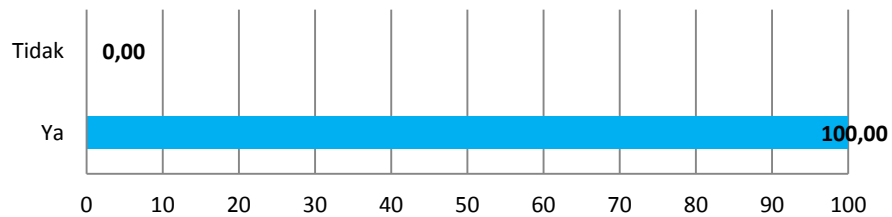


RULE

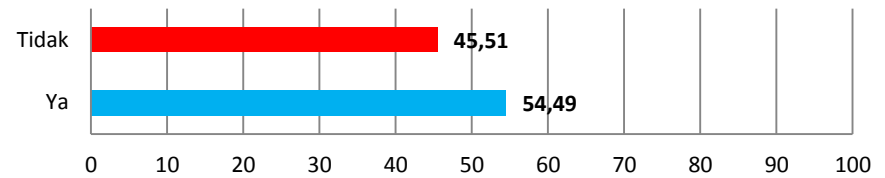
Analisis ROCCPI : **RULE - 1**



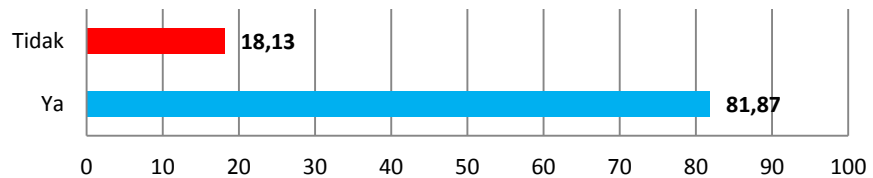
Rule : Mengetahui PP 39/2006



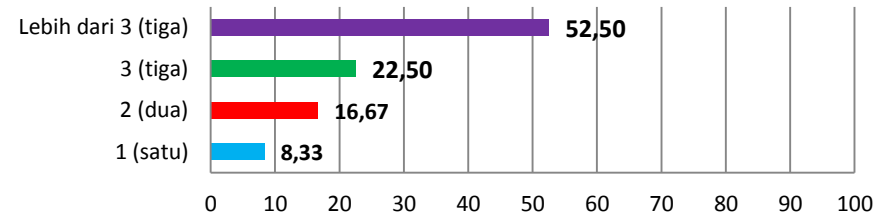
Rule : Memandang PP 39/2006 Berlaku untuk APBN dan APBD Murni



Rule : Mengetahui Ada Peraturan Lain yang mewajibkan pembuatan laporan selain PP 39/2006

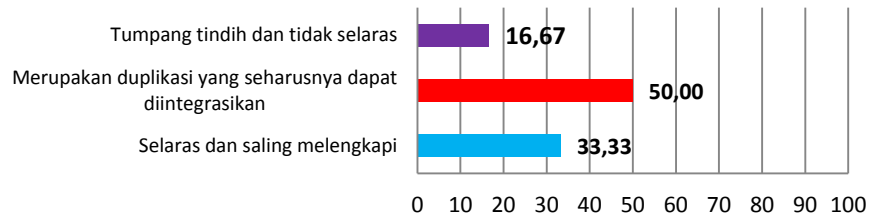


Rule : Jumlah Peraturan yang mewajibkan pelaporan

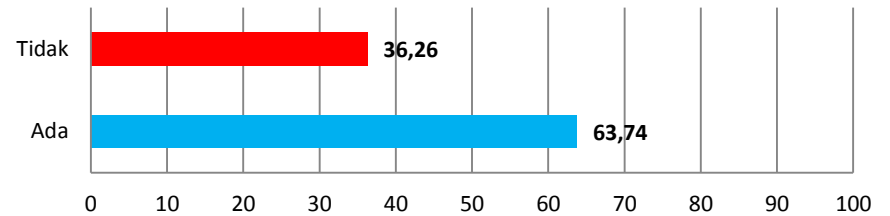


Analisis ROCCIPI : **RULE - 2**

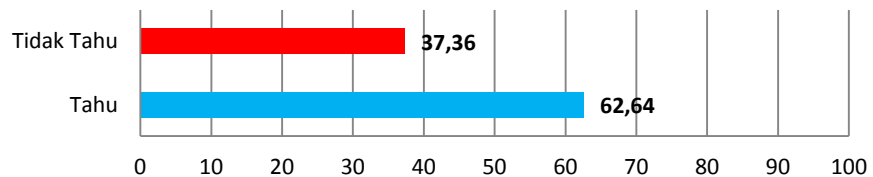
Rule : Hubungan Antar Peraturan



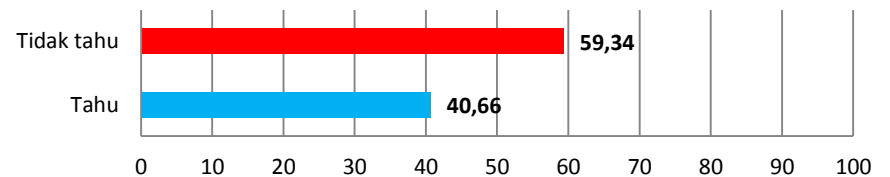
Rule : Memandang ada laporan lain lebih penting



Rule : Memandang seluruh SKPD Prov. Mengetahui adanya PP 39/2006

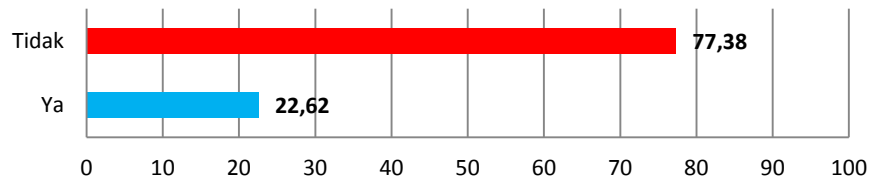


Rule : Memandang seluruh SKPD Kab/Kota Mengetahui adanya PP 39/2006

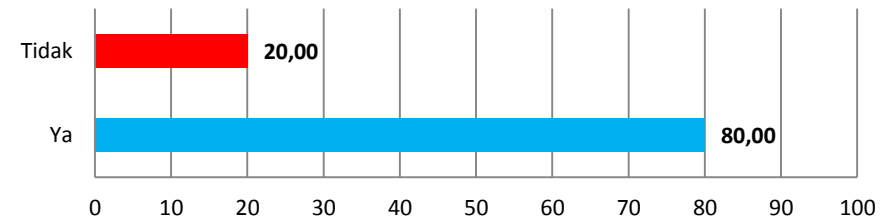


Analisis ROCCIPI : RULE - 3

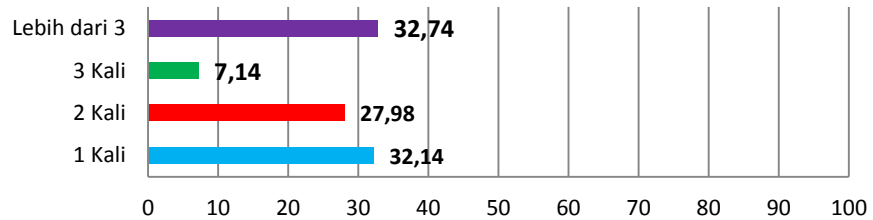
Rule : Perlu ada pihak lain yang diatur dalam PP 39/2006



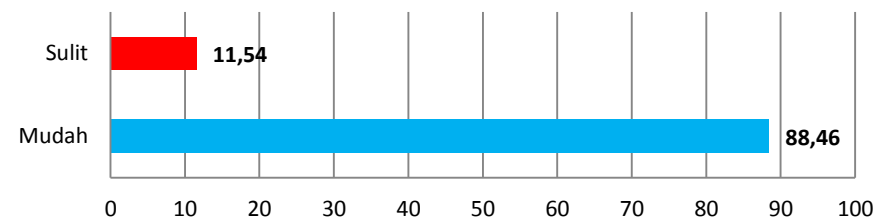
Rule : Pengaturan para tugas pihak jelas



Rule : Frekuensi membaca PP 39/2006



Rule : Pasal-pasal mudah dipahami

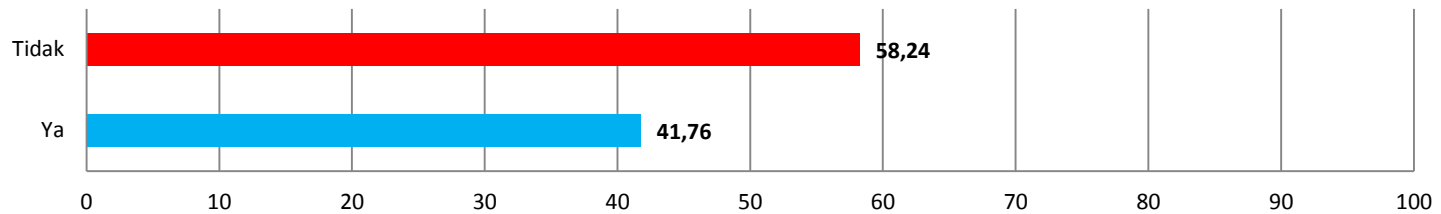




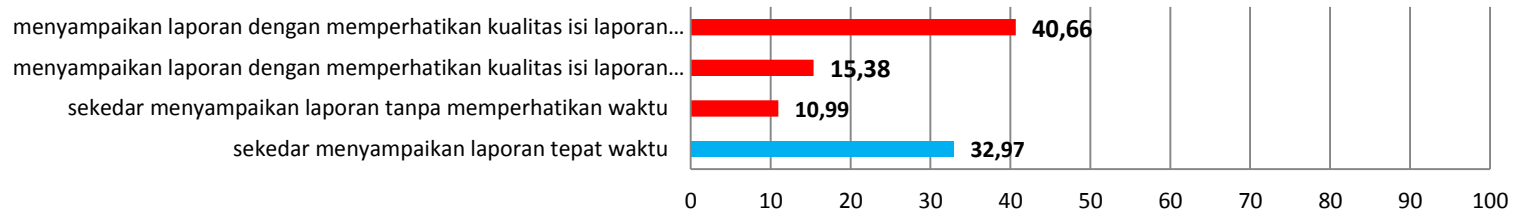
OPPORTUNITY

Analisis ROCCIPI : OPPORTUNITY - 1

Oportunity : PP 39/2006 merupakan beban kerja tambahan



Oportunity : Hal utama dalam menyusun laporan

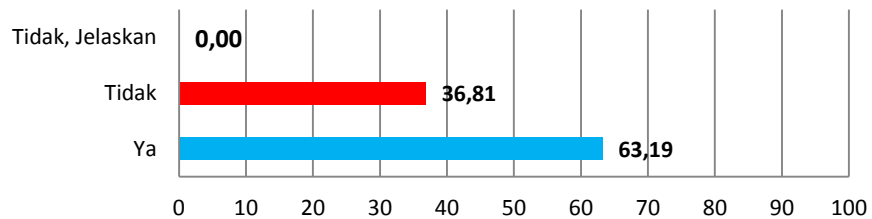




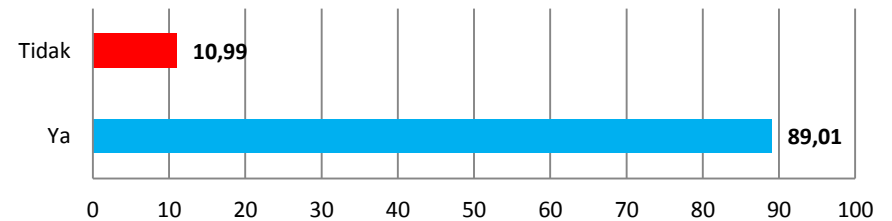
CAPACITY

Analisis ROCCPI : CAPACITY - 1

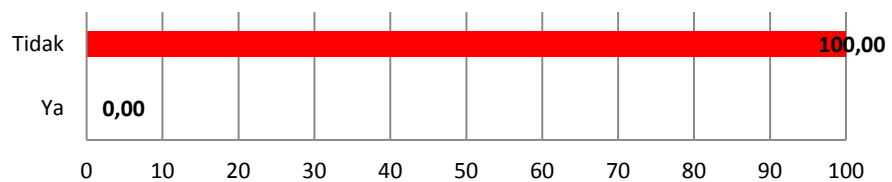
Capacity : Kecukupan Jumlah SDM



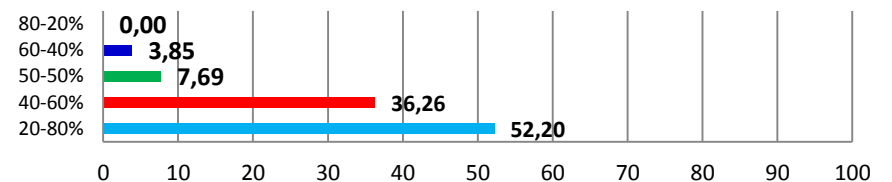
Capacity : SDM terampil dan memiliki pengetahuan



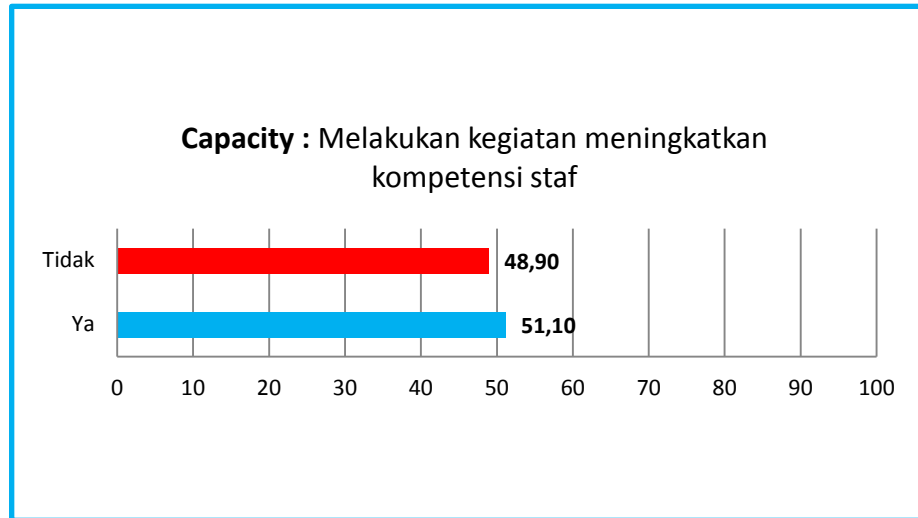
Capacity : SDM hanya bertugas menyusun laporan tanpa ada tugas rutin



Capacity : Presentase menyusun laporan dibandingkan tugas rutin



Analisis ROCCIPI : **CAPACITY** - 2



Penjelasan (bila jawaban “YA”)

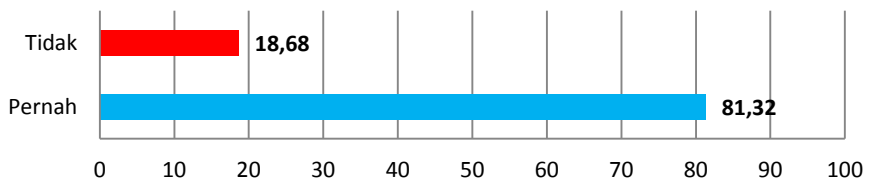


COMMUNICATION

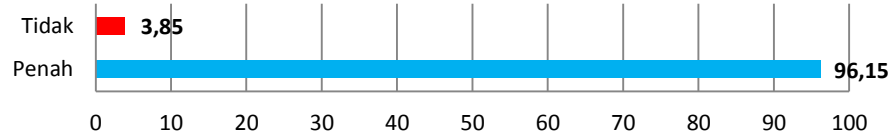
Analisis ROCCIPI : COMMUNICATION - 1



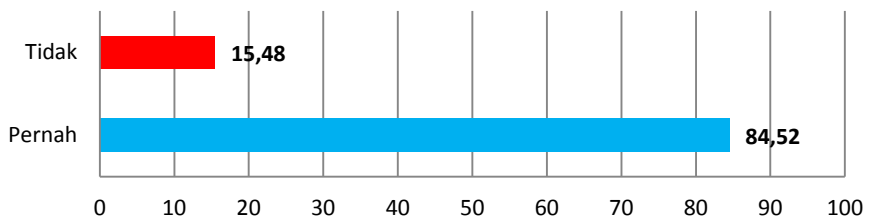
Communication : Pernah berkonsultasi pada Bappenas



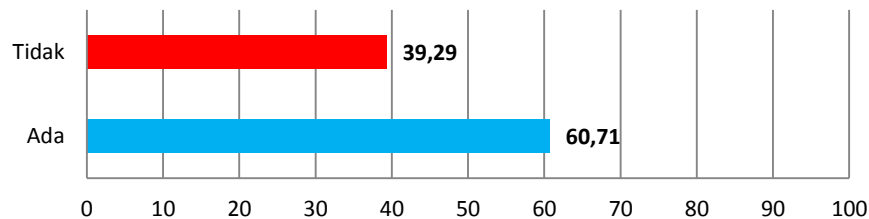
Communication : Pernah menyampaikan permasalahan dalam pelaksanaan PP 39/2006 ke Bappenas



Communication : Jika pernah, mendapat tanggapan



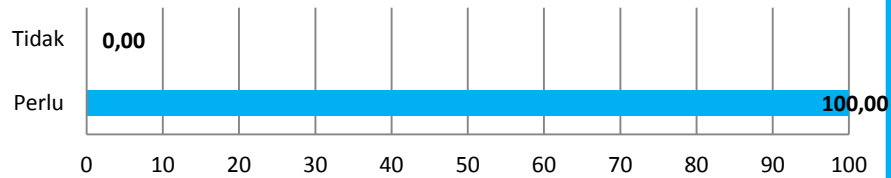
Communication : Ada Perbaikan dari Bappenas



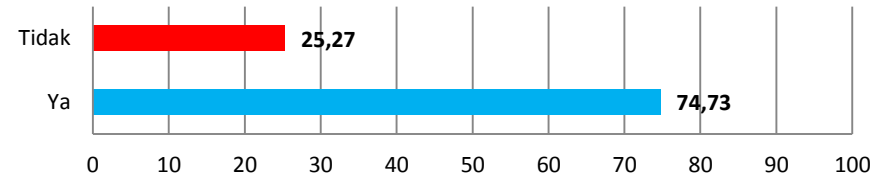
Analisis ROCCIPI : COMMUNICATION - 2



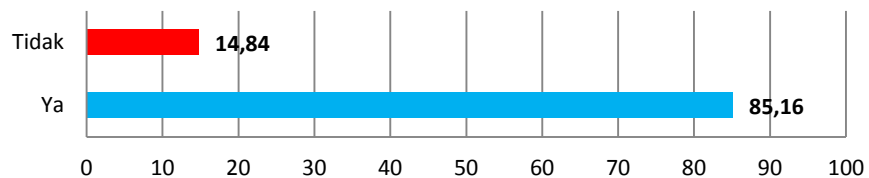
Communication : Memandang perlu ada feedback dari Bappenas



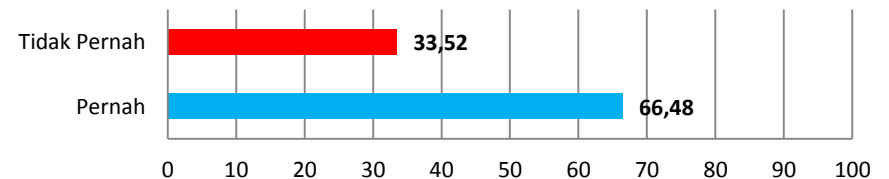
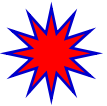
Communication : Teguran berpengaruh terhadap kepatuhan



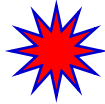
Communication : Mengumumkan Instansi Yang Tidak Menyampaikan Laporan



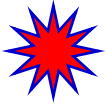
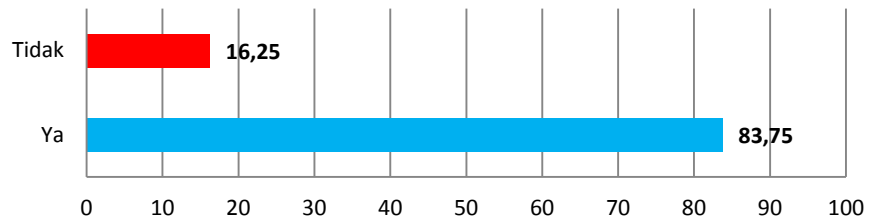
Communication : Bappenas Pernah Melakukan Sosialisasi



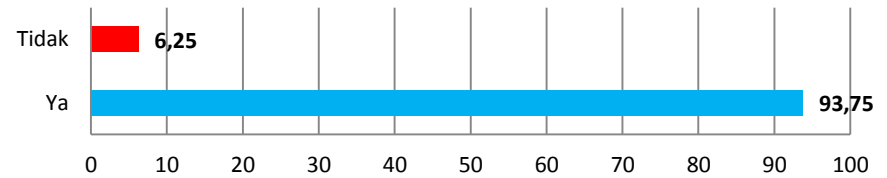
Analisis ROCCPI : **COMMUNICATION** - 3



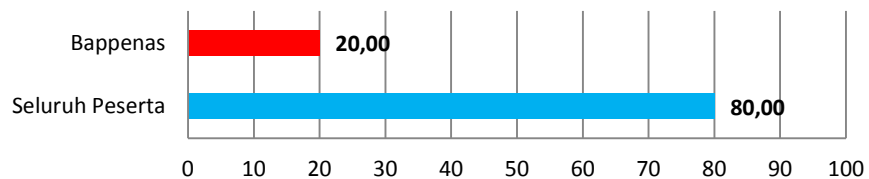
Communication : Sosialisasi Bappenas Membantu



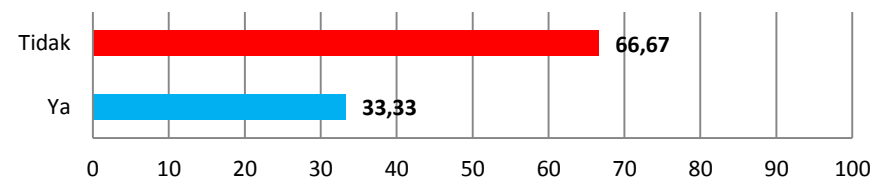
Communication : Sosialisasi Bappenas Diikuti Dengan Praktek



Communication : Praktek Pengisian Formulir Dilakukan Oleh

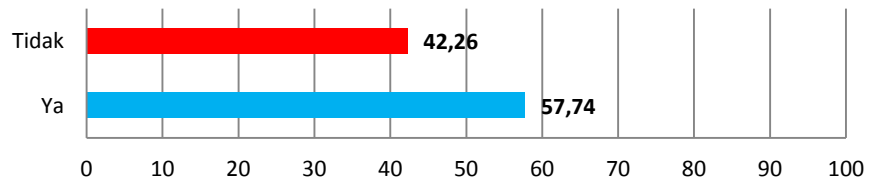


Communication : Bappenas Melakukan Fasilitasi dan Bimtek

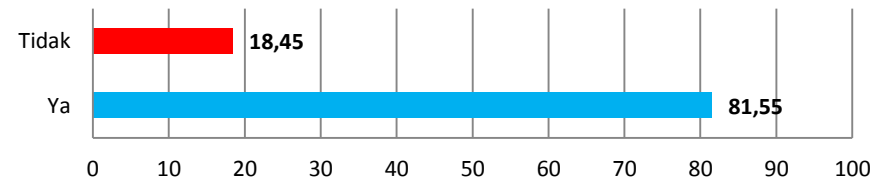


Analisis ROCCIPI : COMMUNICATION - 4

Communication : Aspek Substansi Dalam Fasilitas Yang Disampaikan Dalam Bimtek Cukup



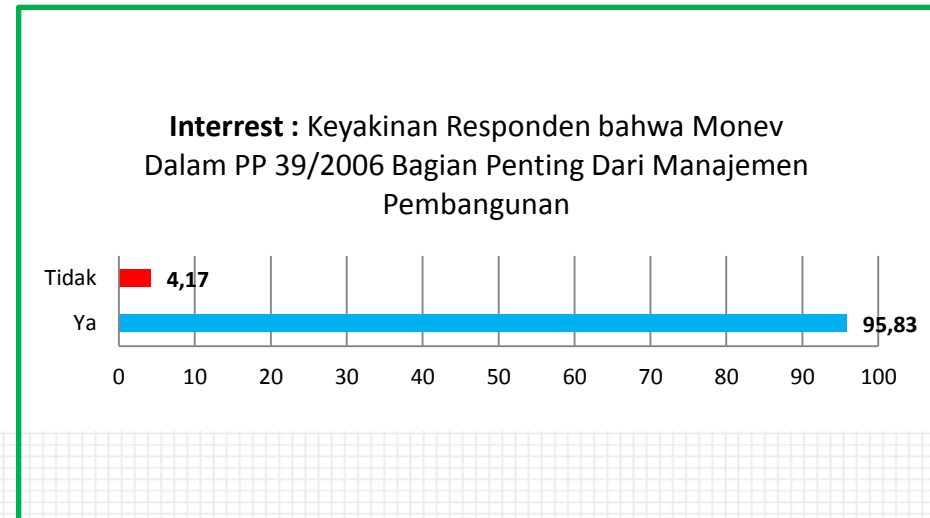
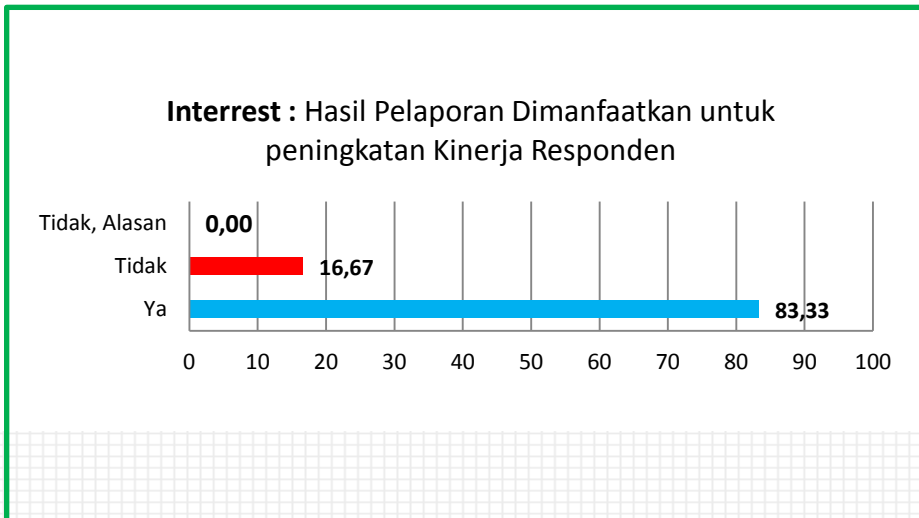
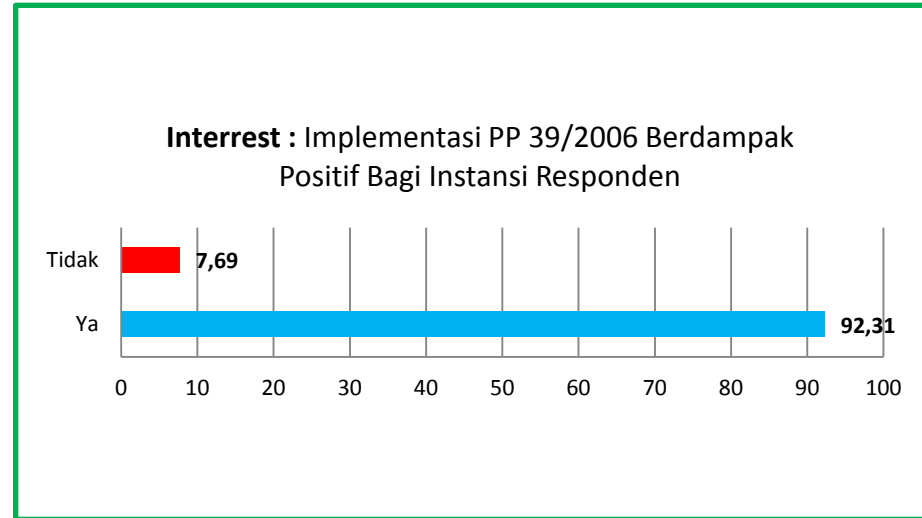
Communication : Instansi Responden Memerlukan Internalisasi





INTEREST

Analisis ROCCPI : **INTEREST** - 1

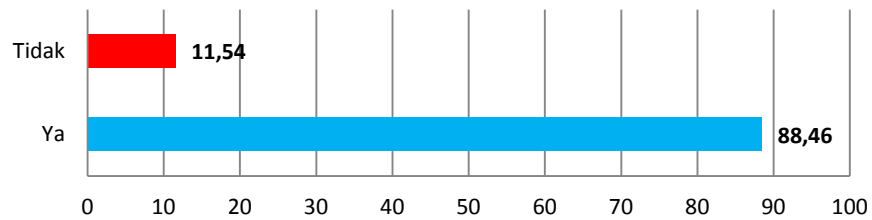




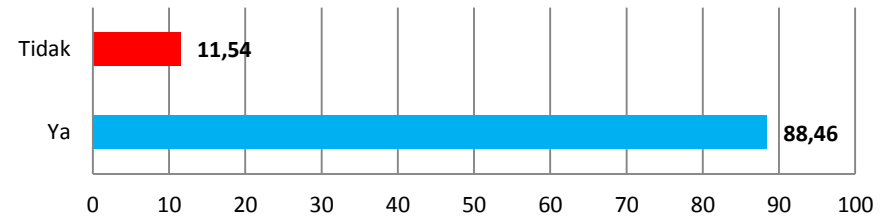
PROCESS

Analisis ROCCPI : PROCESS - 1

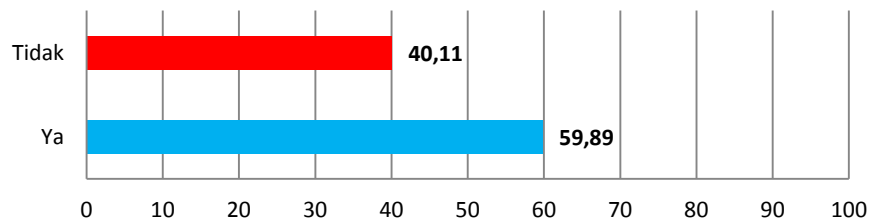
Proses : Mekanisme Pelaporan Jelas



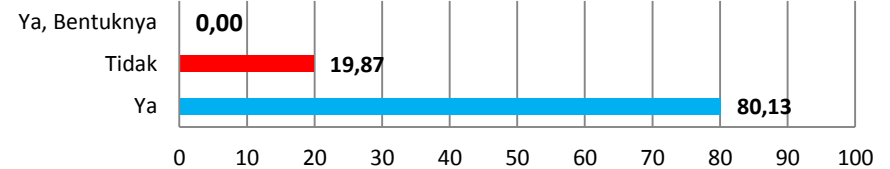
Proses : Mekanisme Pelaporan Jelas



Proses : PP 39/2006 Memerlukan Aturan Operasional

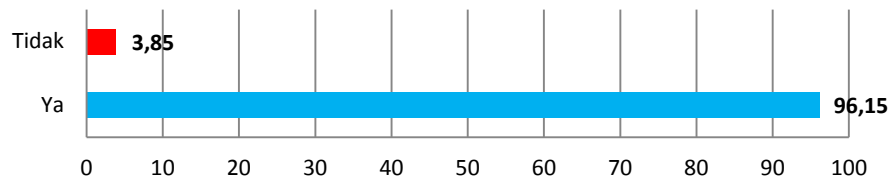


Proses : Instansi Responden Memiliki Mekanisme Internal

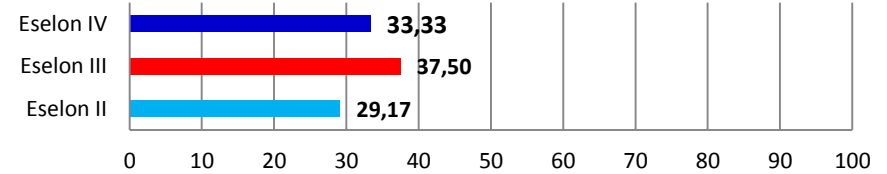


Analisis ROCCIPI : PROCESS - 2

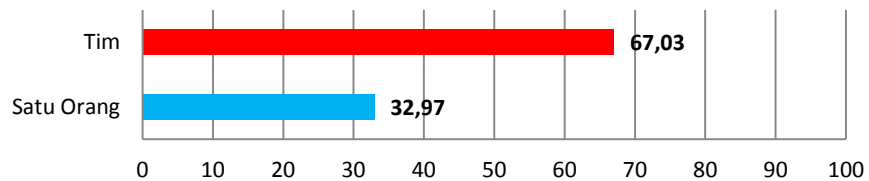
Proses : Koordinator Penyusunan Laporan Pejabat Struktural



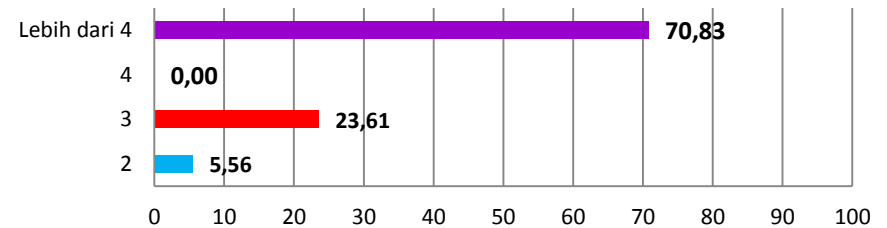
Proses : Tingkat Eselonisasi Koordinator Penyusun Laporan



Proses : Pelaksanaan Penyusunan Laporan Dilaksanakan Oleh

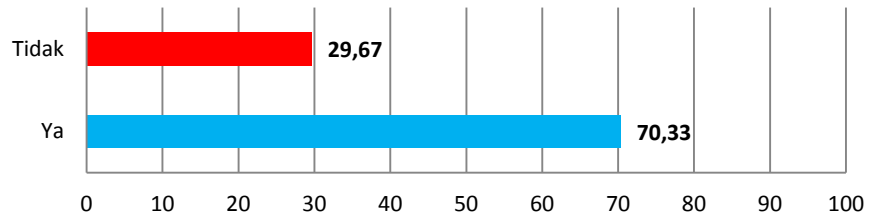


Proses : Jumlah Tim

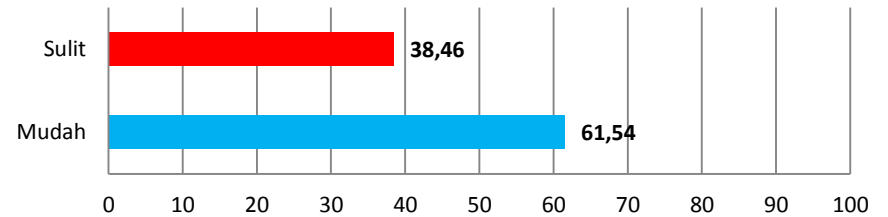


Analisis ROCCIPI : PROCESS - 3

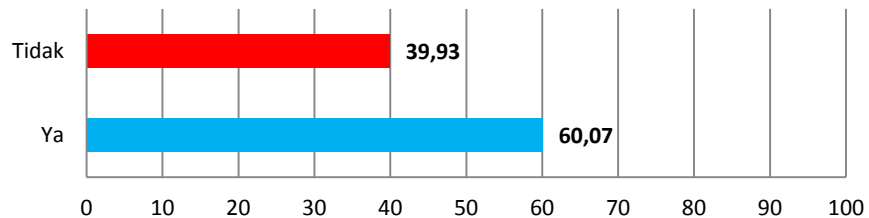
Proses : Menggunakan Aplikasi Elektronik



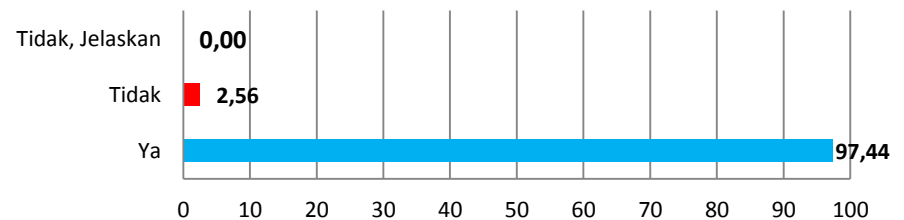
Proses : Pengisian Aplikasi Mudah



Proses : Aplikasi Terlalu Banyak Angka Dan Kode



Proses : Perintah Aplikasi Mudah Dipahami

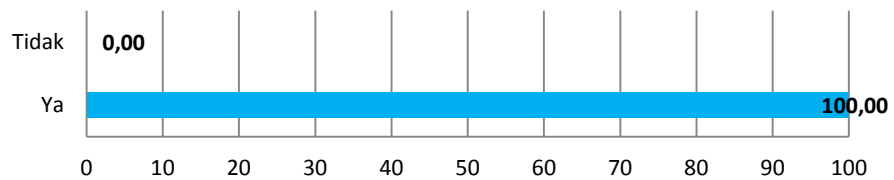




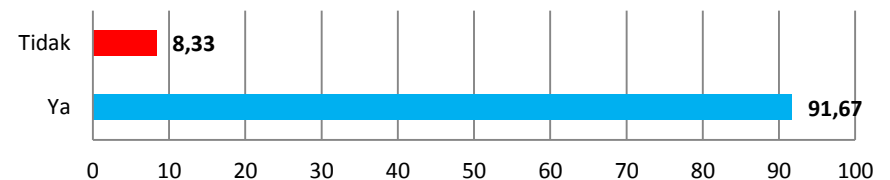
IDEOLOGY

Analisis ROCCPI : IDEOLOGY - 1

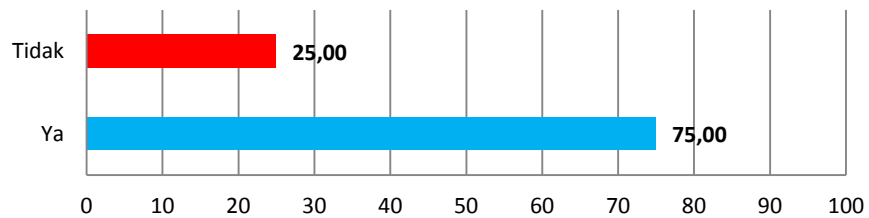
Idiologi : Perlu Kontrol Bappenas Terhadap Implementasi PP 39/2006



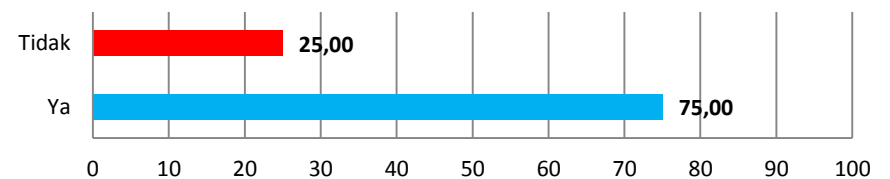
Idiologi : Pandangan Responden Tidak Adanya Sanksi Penyebab Ketidakpatuhan



Idiologi : PP 39/2006 Perlu Dilengkapi Sanksi



Idiologi : Penghargaan Dapat Meningkatkan Kepatuhan

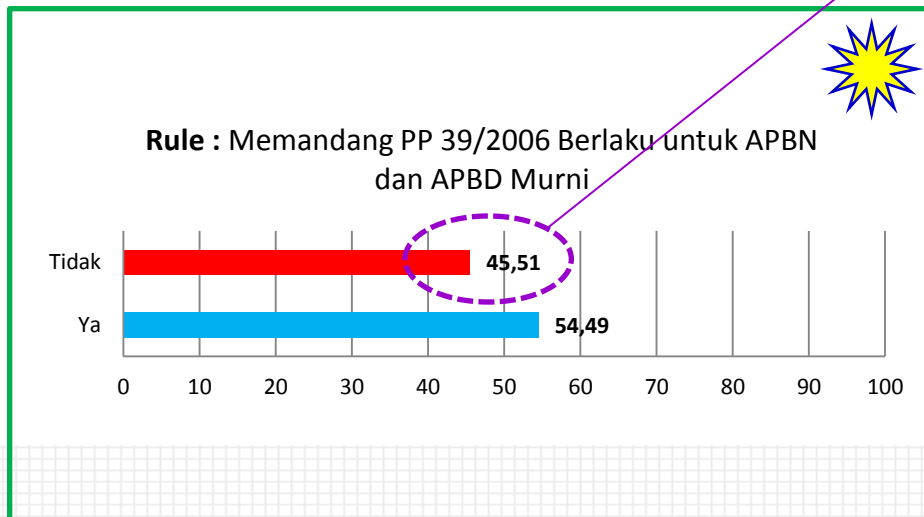
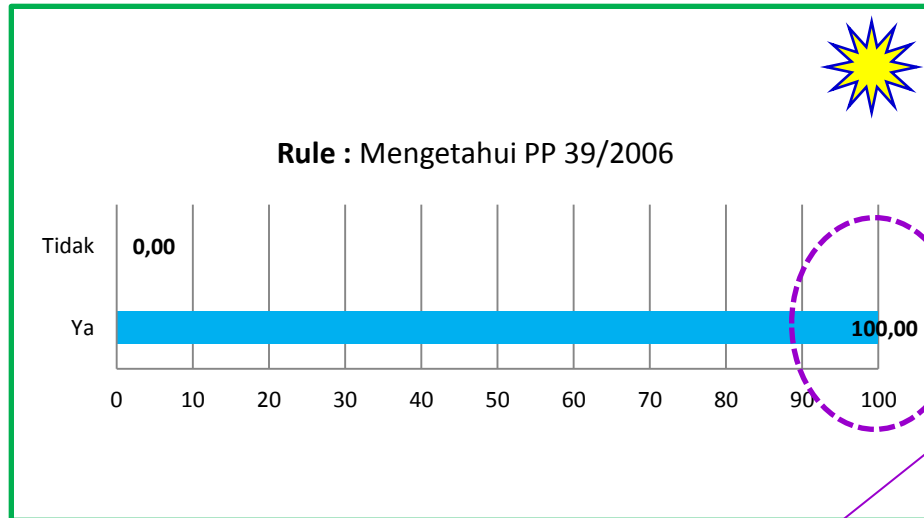




3

Analisis Sederhana (ilustrasi)

Pembahasan: **RULE - 1**

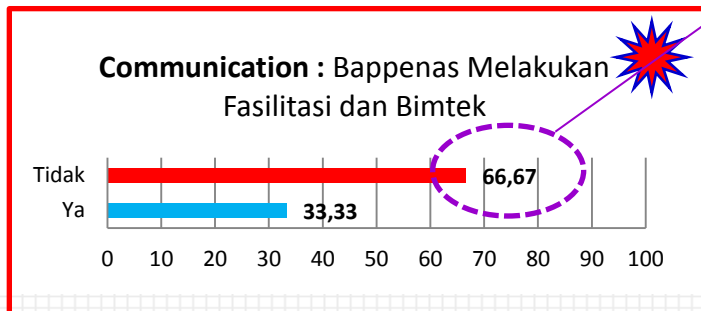
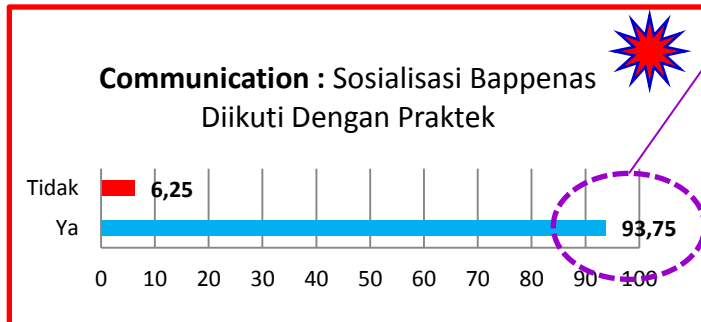
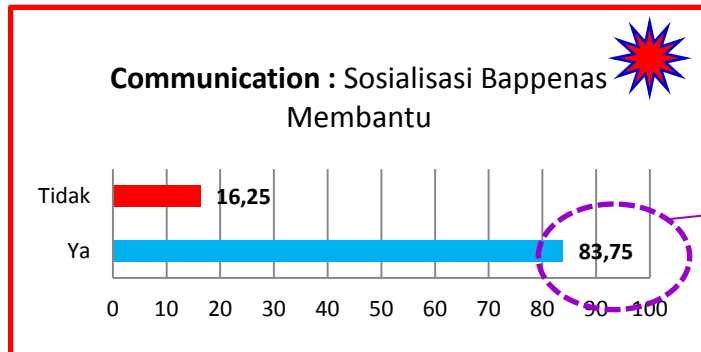


1. Seluruh(100%) responden telah **megetahui** adanya PP 39/2006;
2. Namun hanya sebagian (45,51%) yang **memahami** bahwa PP 39/2006 hanya mengatur monev pembangunan bagi APBN murni;
3. Tingkat “pengetahuan” tidak selalu menggambarkan tingkat “pemahaman”.

Catatan bagi peneliti :

1. Lihat hasil pengisian kuesioner bagian “communication”, berkaitan dengan Bimtek, Sosialisasi, dan upaya lainnya oleh Bappenas;
2. Apakah materi, metode, fasilitator dari Bappenas sudah OK, atau ada sebab lain yang menyebabkan kurang optimal (misal sasaran Bimtek, Sosialisasi)

Pembahasan: COMMUNICATION



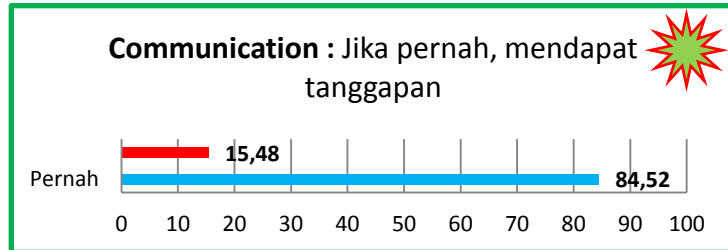
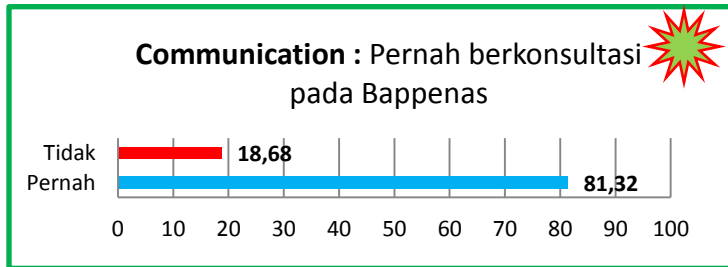
1. Responden memperoleh nilai tambah (terbantu) dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan Bappenas;
2. Tingkat efektivitas nilai tambah terjadi (mungkin) karena diikuti dengan praktek langsung;

1. (namun) Tampak keterbatasan jangkauan Bappenas dalam melakukan kegiatan sosialisasi;
2. Hal ini bisa terkait dengan keterbatasan SDM, waktu, pendanaan, lainnya.

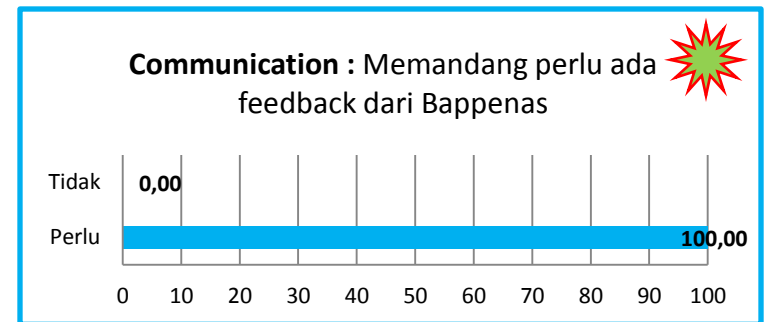
Catatan bagi peneliti :

1. Berikan rekomendasi berupa “solusi kreatif” untuk kendala tersebut, misal : Bappenas menyelenggarakan TOT (dengan sertifikat) untuk aparatur K/L/D agar mereka dapat melakukan sosialisasi pada lingkup tanggungjawab masing-masing;
2. Perhitungkan SCP (spreading, covering, penetrating)

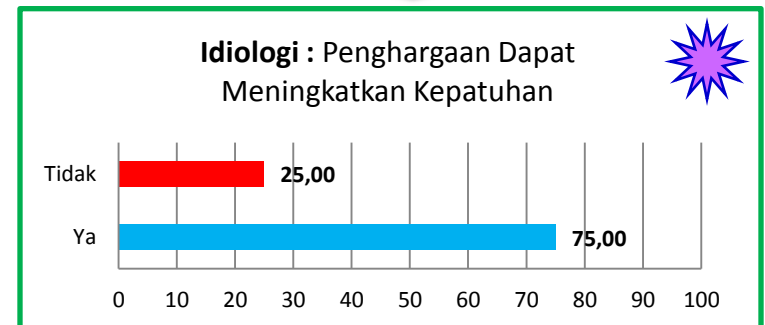
Pembahasan: Communication ↔ Ideology



Ekspektasi



Bentuk Respon Sederhana



Kondisi saat ini:

1. Responden (K/L/D) cukup aktif (81,32%) dalam melakukan konsultasi ke Bappenas;
2. Atas inisiatif konsultasi K/L/D tersebut, Bappenas cukup responsif dalam memberikan tanggapan (84,52%);

Ekspektasi dari K/L/D:

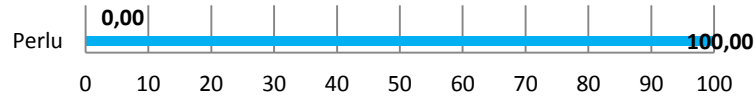
Seluruh (100%) dari inisiatif konsultasi mendapatkan tanggapan (feedback) dari Bappenas

BAHKAN tanggapan sederhana, berupa apresiasi terhadap K/L/D dapat meningkatkan kepatuhan, misal :

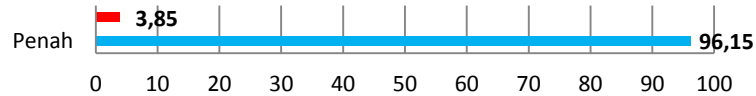
1. Apresiasi bagi yang telah menyampaikan laporan;
2. Mengingatkan K/L/D yang belum menyampaikan laporan, dengan “menanyakan” apakah ada kesulitan dalam penyusunan laporan;

Pembahasan: Kajian Lanjutan (tindak lanjut hasil analisis)

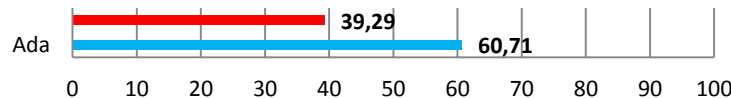
Communication : Memandang perlu ada feedback dari Bappenas



Communication : Pernah menyampaikan permasalahan dalam pelaksanaan PP...



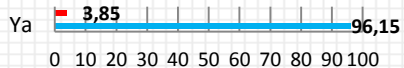
Communication : Ada Perbaikan dari Bappenas



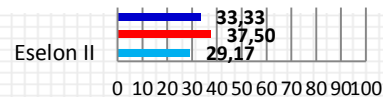
1. Dalam kuesioner dilakukan “pengukuran” besarnya effort (totalitas) K/L/D dalam kepatuhan penyampaian laporan kepada Bappenas;
2. Dengan analogi yang sama, tingkat efektivitas (kinerja) Bappenas terhadap tindak lanjut pengolahan/analisis atas laporan yang telah masuk, dan memberikan tanggapan kepada K/L/D yang telah memberikan laporan (*);
3. Perlu dikaji : apakah di Bappenas telah ada tatalaksana yang mengatur hal tersebut, termasuk mekanisme koordinasi lintas Eselon I maupun lintas Eselon II, agar dapat memberikan tanggapan yang berkualitas.

(*) secara eksplisit ditekankan oleh K/L/D dalam forum diskusi

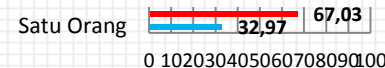
Proses : Koordinator Penyusunan Laporan Pejabat Struktural



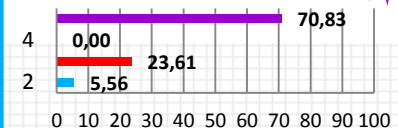
Proses : Tingkat Eselonisasi Koordinator Penyusun Laporan



Proses : Pelaksanaan Penyusunan Laporan Dilaksanakan Oleh



Proses : Jumlah Tim





4

Hal yang Memerlukan Perhatian



Nilai Tambah Pelaksanaan Kajian :

1. Analisis dan pendalaman **tindak lanjut atas hasil analisis diharapkan dapat menemukenali akar masalah atas kondisi “tingkat efektivitas”** implementasi PP 39/2006;
2. Dengan demikian dapat **dirumuskan rekomendasi yang “tajam” dan fokus** dalam upaya meningkatkan “tingkat efektivitas” implementasi PP 39/2006;
3. Kajian yang dilakukan maupun tindak lanjut rekomendasi, dapat menjadi **“point” yang sangat positif dalam Reformasi Birokrasi**, bahkan dapat menjadi **quick win** bagi Kedeputian Evaluasi.

Catatan :

1. Tingkat “kepercayaan” pada hasil sangat dipengaruhi oleh pemahaman atas PP 39/2006 **para responden**, baik secara substansi hukum maupun dalam praktek implementasi (pelaksanaan program/kegiatan dan pembuatan laporan);
2. Nilai proporsional (misal: mendapat tanggapan dari Bappenas 84,2%), sangat relatif terhadap sampel responden (belum tentu mewakili populasi K/L/D). Beberapa kondisi terjadi bahwa sampel adalah “K/L/D langganan”, yang paling kooperatif, kalau diundang pasti datang, atau karena hal non teknis lainnya;



TERIMAKASIH